

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. UU Nomor 36 Tahun 2009 ini juga telah ditetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebab itu, setiap elemen masyarakat baik individu, keluarga, berhak memperoleh pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab merancang, mengatur menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat (Permenkes, 2009).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas (Alamsyah *et al.*, 2020).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permenkes, 2016).

Uraian tersebut di atas yang melatar belakangi penelitian ini. Hal ini dikarenakan bahwa laar belakang di atas menggambarkan secara komprehensif urgensi dan relevansi penelitian dalam konteks regulasi kesehatan, Pelayanan kesehatan masyarakat, serta kebijakan publik, dengan fokus pada Anlisis pengelolaan sediaan farrmasi habis pakai di pukesmas batujaya kabupaten karawang

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang biasa disebut drugs management cycle (Ihsan *et al.*, 2014). Selain itu, manajemen pengelolaan farmasi juga sangat krusial karena unit farmasi memainkan peran penting dalam menunjang pendapatan (revenue) klinik. Biaya yang diserap untuk pengadaan obat di klinik cukup tinggi, yaitu berkisar 30-40%. Kerugian ekonomi dapat ditimbulkan akibat kondisi persediaan obat dalam keadaan menumpuk (stagnant) maupun terjadinya kekurangan (stock out) obat (Ruswanti *et al.*, 2013).

Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional, agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka pengelolaan obat di klinik perlu dilakukan sesuai yang ditetapkan dan diharapkan di mana dalam pengelolaan harus memperhatikan penerimaan, penyimpanan serta pencatatan dan pelaporan yang baik. Menurut penelitian terkait pengelolaan obat yang dilakukan oleh Pudjiraharjo & Mellen (2013) Melaporkan bahwa stockout dan stagnant obat terjadi dikarenakan oleh perencanaan dan pengadaan obat yang berlebihan serta tidak akurat. Selain itu, stockout dan stagment obat terjadi karena adanya perubahan pola penyakit, sehingga obat yang telah direncanakan berdasarkan pemakaian sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Di Indonesia, sistem kesehatan diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu regulasi penting dalam konteks pelayanan kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 74 Tahun 2016. Permenkes No. 74 Tahun 2016

mengatur tentang pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara terstruktur untuk mengenali, menghindari, dan menangani permasalahan terkait pengobatan. Dalam hal ini, apoteker memainkan peran sentral dalam Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai (Tsalsabilla & Yulianti, 2022)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Permenkes No. 74 Tahun 2016 telah dilaksanakan di Puskesmas Batujaya Kabupaten Karawang, khususnya dalam konteks Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai masalah atau hambatan dalam implementasi regulasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas Pangkalan Kabupaten Karawang.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan yang berharga bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, puskesmas, serta masyarakat, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kefarmasian di tingkat primer. Mengingat masih sedikit penelitian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Karawang, khususnya Puskesmas maka perlu dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan standart pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peran apoteker di puskesmas, Apakah sudah sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 dan apakah ada pengaruh dalam Analisis Pengelolaan Sediaan Farmasi Habis Pakai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana analisis pengelolaan sediaan farmasi habis pakai di Puskesmas Batujaya Kabupaten Karawang berdasarkan permenkes no.74 tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui analisis pengelolaan sediaan farmasi habis pakai di puskesmas Batujaya Kabupaten Karawang berdasarkan permenkes no.74 tahun 2016.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan yang dapat memberikan informasi penting bagi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan obat.

1.4.2 Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan dan saran bagi Puskesmas Batujaya dalam proses pengelolaan obat yang efektif dan efisien.

1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran dan menambah pengetahuan lebih dalam bagi peneliti mengenai administrasi dan kebijakan kesehatan khususnya manajemen pengelolaan obat, serta syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.